

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS TERHADAP PENATAAN RUANG DI KAWASAN STRATEGIS PROVINSI (KSP) SENGGIGI TIGA GILI

Oleh :

Teddy Hartawan, Eliza Ruwaidah
Dosen Tetap pada Fakultas Teknik UNTB

Abstrak: Kawasan Senggigi Tiga Gili terdiri dari 2 (dua) wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara. Kawasan Senggigi Tiga Gili dengan sektor unggulan pariwisata, industri dan perikanan diharapkan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB secara menyeluruh sehingga dibutuhkan regulasi dari aspek perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang untuk menunjang berbagai kegiatan infrastruktur serta kegiatan sektoral lainnya dalam rangka perwujudan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Sebagai sebuah dokumen perencanaan yang menyangkut aspek keruangan, maka diperlukan pertimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan agar proses dan manfaat dapat terlaksana secara optimal dan lestari. KLHS atau *Strategic Environmental Assessment* (SEA) merupakan suatu rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif serta pendekatan strategis jangka panjang pengelolaan lingkungan menuju pembangunan berkelanjutan. KLHS wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah serta Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP). KLHS wajib diintegrasikan kedalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam hal ini termasuk memaduserasikan KRP yang berpotensi menimbulkan dampak atau resiko lingkungan hidup, fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di suatu wilayah. Berdasarkan hasil kajian pengawasan mutu pelaksanaan kegiatan KLHS, disimpulkan: 1) Sebanyak 8 sub-kegiatan (31% dari total kegiatan) telah tercakup sepenuhnya, terutama pada kegiatan yang sifatnya pengindetifikasian dan inventarisir. 2) Sebanyak 14 sub-kegiatan (54% dari total kegiatan) telah tercakup sebagian besar, terutama pada kajian-kajian mengenai isu-isu pembangunan. Meskipun demikian, diperlukan penyempurnaan dengan memperkaya referensi kajian dan analisis mengenai efek-efek KRP terhadap lingkungan. 3) Hanya 2 sub-kegiatan (8% dari total kegiatan) yang tercakup sebagian kecil, yaitu pada sub-kegiatan mengonsultasikan dan menyepakati substansi rekomendasi bersama SKPD dan mengintegrasikan kesepakatan substansi rekomendasi ke RTR KSP bersama Tim Penyusun RTR KSP. Nilai ini diberikan mengingat proses penyusunan RTR KSP telah rampung dan telah diperdakan. 4) Hanya 2 sub-kegiatan (8% dari total kegiatan) yang tidak tercakup sama sekali, yaitu pada sub-kegiatan yang berkaitan dengan penyampaian rancangan RTR KSP kepada Gubernur dan Bupati serta dokumentasinya. Hal ini disebabkan karena proses ini telah berakhir dan pada saat itu proses KLHS belum dilaksanakan.

Kata kunci : Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Kawasan Strategis Provinsi (KSP), Senggigi Tiga Gili

PENDAHULUAN

Kawasan Senggigi Tiga Gili terdiri dari 2 (dua) wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara. Kawasan Senggigi Tiga Gili dengan sektor unggulan pariwisata, industri dan perikanan diharapkan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB secara menyeluruh sehingga dibutuhkan regulasi dari aspek perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang untuk menunjang berbagai kegiatan infrastruktur serta kegiatan sektoral lainnya dalam rangka perwujudan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Sebagai sebuah dokumen perencanaan yang menyangkut aspek keruangan, maka diperlukan

pertimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan agar proses dan manfaat dapat terlaksana secara optimal dan lestari. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Pasal 18 ayat (2), serta Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengamatkan perlunya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam sebuah produk perencanaan, baik non-spasial maupun spasial agar prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan integrasi dalam pembangunan suatu wilayah.

KLHS atau *Strategic Environmental Assessment* (SEA) merupakan suatu rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif serta pendekatan strategis jangka panjang pengelolaan lingkungan menuju pembangunan berkelanjutan. KLHS wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah serta Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP). Yang dimaksud dengan kebijakan, rencana dan program secara umum adalah sebagai berikut:

- Kebijakan (Policy)**, yaitu arah yang hendak ditempuh (*road-map*) berdasarkan tujuan yang di gariskan, penetapan prioritas, garis besar aturan dan mekanisme untuk mengimplementasikan tujuan.
- Rencana (Plan)**, yaitu design, prioritas, opsi, sarana dan langkah-langkah yang akan ditempuh berdasarkan arah kebijakan dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kesesuaian sumber daya.
- Program (Programme)**, yaitu serangkaian komitmen, pengorganisasian aktifitas atau sarana yang akan di implementasikan pada jangka waktu tertentu dengan berlandaskan pada kebijakan dan rencana yang telah di gariskan.

Di samping itu, KLHS wajib diintegrasikan kedalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam hal ini termasuk memaduserasikan KRP yang berpotensi menimbulkan dampak atau resiko lingkungan hidup, fungsi dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di suatu wilayah. Penyusunan KLHS memberi kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup dan meningkatnya mutu KRP yang dihasilkan, melalui:

- Identifikasi efek atau pengaruh lingkungan yang akan timbul;
- Mempertimbangkan alternatif yang ada, termasuk opsi praktek-praktek pengelolaan lingkungan hidup yang baik;
- Antisipasi dan pencegahan terhadap dampak lingkungan pada sumber persoalan;
- Peringatan dini atas dampak kumulatif dan resiko global yang akan muncul; dan
- Aplikasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

KLHS juga mendorong pendekatan atau cara baru untuk pengambilan keputusan, melalui:

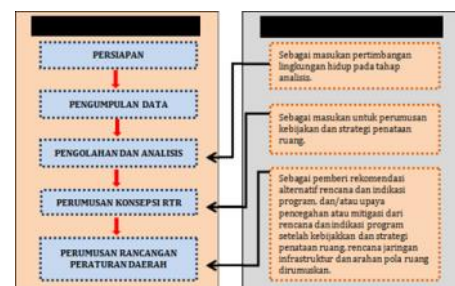
- Integrasi pertimbangan lingkungan dan penerapan atas prinsip-prinsip berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan;
- Dialog dan diskusi dengan para pihak yang berkepentingan dan penyelenggaraan konsultasi publik;
- Akuntabilitas dan transparansi dalam merancang, memformulasikan dan memutuskan kebijakan, rencana dan program.

Sementara itu, penataan ruang sebagai suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang harus diselenggarakan dengan baik. Guna membantu mengupayakan perbaikan kualitas Rencana Tata Ruang (RTR), maka KLHS menjadi salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (*framework of thinking*) untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dokumen KLHS dalam mengidentifikasi pengaruh isu-isu strategis terhadap KRP pembangunan KSP Senggigi Tiga Gili terhadap berbagai aspek dalam komponen lingkungan hidup di KSP Senggigi Tiga Gili untuk kemudian diintegrasikan sebagai masukan dalam penyusunan RTR KSP Senggigi Tiga Gili Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Kedudukan KLHS dalam Proses Penyusunan RTR KSP Senggigi Tiga Gili

KLHS untuk RTR KSP merupakan upaya pertimbangan lingkungan hidup dalam penyusunan RTR KSP Senggigi Tiga Gili yang disusun sesuai dengan tujuan penataan ruang. Muatan KLHS RTR KSP Senggigi Tiga Gili lebih memfokuskan pada kajian pengaruh KRP terhadap keberlangsungan lingkungan hidup yang tidak hanya menyangkut ketersediaan sumberdaya lahan serta meliputi kajian pengaruh terhadap kinerja ekosistem dan keanekaragaman hayati. Secara diagramatis kedudukan KLHS RTR KSP Senggigi Tiga Gili digambarkan sebagaimana diagram di bawah ini.



Gambar 1. Diagram Posisi Proses KLHS dalam Penyusunan RTR KSP

b. Konsep Dasar KLHS

Lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Keberlanjutan (*sustainability*), konsep keberlanjutan yang digunakan disini berasosiasi dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang diperkenalkan oleh *World Commission on Environment and Development* sebagaimana tertuang dalam laporan Brundtland: “pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka”. Wikipedia mendefinisikan keberlanjutan sebagai karakteristik suatu proses atau kondisi tertentu yang dapat terus bertahan untuk jangka waktu yang tak terbatas. Sementara Partidario (2007) mendefinisikan keberlanjutan sebagai suatu proses atau kondisi tertentu yang dicapai sebagai hasil pembangunan berkelanjutan yang berlangsung dalam jangka panjang waktu yang panjang.

Terminologi “strategis” mengandung arti perbuatan atau aktivitas yang dilakukan sejak awal proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih. Dalam konteks KLHS, perbuatan dimaksud adalah suatu kajian yang dapat menjamin dipertimbangkannya sejak dini aspek lingkungan hidup dalam proses pengambilan keputusan dalam penyusunan kebijakan, rencana atau program.

Sejalan dengan pengertian tersebut, pendekatan strategis dalam Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) dengan demikian bukanlah untuk mencari tahu apa yang akan terjadi di masa depan, melainkan untuk merencanakan dan mengendalikan langkah-langkah yang akan ditempuh sedemikian rupa sehingga terbangun atau terbentuk route untuk menuju masa depan yang diinginkan (Partidário, 2007).

c. Prinsip Dasar dan Nilai-Nilai KLHS

Mengacu pada Permen LH No 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan KLHS, beberapa prinsip dalam melakukan kegiatan KLHS adalah :

- Terpadu;
- Berkelanjutan;
- Fokus;
- Transparan;
- Akuntabel;
- Partisipatif;
- Interaktif.

Di dalam penyelenggaraan KLHS tidak hanya elemen partisipasi masyarakat yang disentuh tetapi juga persoalan transparansi dan akuntabilitas. Sebab yang dituju KLHS pada hakekatnya adalah lahirnya kebijakan, rencana dan program yang melalui proses-proses yang partisipatif, transparan dan akuntabel mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dan keberlanjutan.

Selain prinsip-prinsip dasar tersebut, khusus untuk Indonesia, juga terformulasi nilai-nilai yang dipandang penting untuk dianut dalam aplikasi KLHS di Indonesia. Nilai-nilai dimaksud adalah:

1. **Keterkaitan (*interdependency*)** digunakan sebagai nilai penting dalam KLHS dengan maksud agar dalam penyelenggaraan KLHS dipertimbangkan benar keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lain, antara satu unsur dengan unsur lain, atau antara satu variabel biofisik dengan variabel biologi, atau keterkaitan antara lokal dan global, keterkaitan antar sektor, antar daerah, dan seterusnya. Dengan membangun pertautan tersebut KLHS dapat diselenggarakan secara komprehensif atau holistik.
2. **Keseimbangan (*equilibrium*)** digunakan sebagai nilai penting dalam KLHS dengan maksud agar penyelenggaraan KLHS senantiasa dijiwai atau dipandu oleh nilai-nilai keseimbangan seperti keseimbangan antara kepentingan sosial ekonomi dengan kepentingan lingkungan hidup, keseimbangan antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang, keseimbangan kepentingan pembangunan pusat dan daerah, dan lain sebagainya. Implikasinya, forum-forum untuk identifikasi dan pemetaan kedalaman kepentingan para pihak menjadi salah satu proses dan metode yang penting digunakan dalam KLHS.
3. **Keadilan (*justice*)** digunakan sebagai nilai penting dengan maksud agar melalui KLHS dapat dihasilkan kebijakan, rencana dan program yang tidak mengakibatkan marginalisasi sekelompok atau golongan tertentu masyarakat karena adanya pembatasan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber alam atau modal atau pengetahuan.

METODOLOGI PENELITIAN

a. Metode Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data (survey) yang dilakukan mencakup 2 jenis kegiatan yang didasarkan pada jenis datanya, yaitu;

1. Survey primer

Survey primer ini dilakukan untuk mendapatkan data-data atau informasi yang

bersifat primer, yaitu data atau informasi yang didapat langsung dari lapangan. Teknik untuk mendapatkan data tersebut adalah dengan observasi, pengukuran, perhitungan serta wawancara. Kegiatan ini terutama bertujuan untuk memperoleh gambaran keadaan yang spesifik di wilayah studi.

2. Survey Sekunder

Survey sekunder ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang bersifat sekunder, yaitu data-data yang dihasilkan atau dikumpulkan oleh dinas-dinas maupun instansi sektoral yang terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara maupun mereproduksi dari data yang ada. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengumpulan data untuk kegiatan penyusunan KLHS ini adalah:

- a) Data dan informasi dapat diperoleh dari pemangku kepentingan seperti instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian
- b) Data dan informasi dapat berupa data sekunder maupun primer
- c) Data dan informasi yang dikumpulkan yang diperlukan saja, khususnya yang terkait dengan isu strategis lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati
- d) Verifikasi data dan informasi perlu dilakukan untuk menjamin keabsahannya
- e) Informasi sekunder dapat digabungkan dengan data primer yang dikumpulkan melalui diskusi dengan masyarakat lokal yang memahami wilayah studi, misalnya dengan observasi lapangan, wawancara langsung, diskusi dengan stakeholder kelompok terfokus (FGD) dan survey.

Data dan informasi yang diperoleh dari survey primer dan sekunder, biasanya masih bersifat kasar, yang mana masih diperlukan adanya pengolahan lebih lanjut sehingga data dan informasi yang disajikan lebih informatif serta mudah dibaca dan dipahami. Adapun teknik pengolahan dan penyusunan data didasarkan pada jenis dan sifat data bersangkutan, antara lain:

- a) Data yang sifatnya kuantitatif, diolah dan disusun dengan tabulasi, yang dalam penyajian akhir berupa tabel-tabel, grafik maupun uraian
- b) Data yang bersifat kualitatif, diolah dan disusun secara deskriptif, yaitu berupa uraian yang menerangkan keadaan data tersebut

- c) Data yang sifatnya menunjukkan letak, diolah dan disusun dengan menggunakan peta-peta data.

b. Metode Telaah dan Analisis Teknis

Metode yang digunakan di dalam penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah sebagai berikut :

1. Interpretasi data dasar, digunakan untuk identifikasi masalah pokok lingkungan dan masalah pembangunan berkelanjutan, yang selanjutnya ditapis menjadi isu strategis KLHS
2. *Content Analysis* untuk menelaah materi peraturan perundangan dan dokumen-dokumen perencanaan.
3. Penyusunan daftar Pertanyaan *E_question* untuk menelaah pengarusutamaan lingkungan hidup di dalam rumusan kebijakan, rencana dan program.
4. Daftar Periksa (*Cheklis*) untuk telaah konsistensi rencana dengan program.
5. Bagan alir untuk pendugaan implikasi kebijakan dan rencana kegiatan.
6. Aplikasi Sistem Informasi Geografi (SIG) dan Pemodelan Dinamis untuk menjelaskan aspek spasial isu strategis dan kebencanaan serta keterkaitan antar komponen.
7. Diskusi Terbatas (FGD) untuk membahas hasil-hasil telaah Tim KLHS dan bersama-sama merumuskan alternatif dan mitigasi.

c. Metode Evaluasi Dampak

Untuk menganalisis timbulnya dampak dilakukan dengan metode formal dan informal. Metode formal, yaitu analisis dampak dilakukan dengan menggunakan rumus standar yang sudah biasa digunakan dalam masing-masing bidang. Sedangkan metode informal menggunakan beberapa metode berikut

1. Pendekatan Analogi
Prakiraan dampak dilakukan dengan membandingkan atau menggunakan pengalaman kegiatan serupa di tempat lain.
2. Pendugaan Pakar
Analisis dampak penting didasarkan atas pengalaman, pertimbangan dan latar belakang keahlian pakar (*profesional judgement*). Metode ini digunakan bila terdapat banyak hal yang bersifat informatif dan tidak diketahui keadaan sebenarnya secara langsung. Analisis ini akan difokuskan untuk menilai keberlanjutan kebijakan yang direncanakan di dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTR KSP) Senggigi Tiga Gili dengan kerangka Kebijakan versus Lingkungan pada matriks berikut ini

Tabel 1. Model Matriks Penelaahan Kebijakan terhadap Komponen Lingkungan

KEBIJAKAN	KOMPONEN LINGKUNGAN ^{*)}			
	1	2	3	4
Kebijakan A	-	-	-	-
Kebijakan B	-	-	-	-
Kebijakan C	-	-	-	-

Keterangan: ^{*)} Komponen lingkungan ditentukan berdasarkan isu-isu lingkungan strategis/penting

Baseline data serta data hasil survey lapangan dan observasi akan dimanfaatkan untuk kepentingan analisis tersebut, baik secara kualitatif maupun kuantitatif sesuai dengan karakteristik data yang tersedia. Berbagai instrumen akan digunakan dalam tahap ini, seperti penggunaan GIS dan pemetaan, matrik, *trend analysis*, komparasi dengan berbagai standard, professional judgement dan pendekatan lainnya yang mungkin. Dampak kebijakan terhadap lingkungan hidup yang dihasilkan dari analisis akan dipertajam melalui diskusi Tim Pokja KLHS untuk mendapatkan rumusan yang paling baik melalui pendekatan yang lebih komprehensif.

PEMBAHASAN PENELITIAN

Pengkajian dalam evaluasi Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (RTR – KSP) Senggigi Tiga Gili terdiri dari 3 (tiga) tahap sesuai dengan prinsip pembangunan keberlanjutan, yaitu:

1. Kajian Prinsip Keterkaitan, meliputi: keterkaitan antar wilayah, keterkaitan antar waktu, keterkaitan antar sektor, dan keterkaitan antar pemangku kepentingan;
2. Kajian Prinsip Keseimbangan, meliputi: kesetimbangan antar kepentingan ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup;
3. Kajian Prinsip Keadilan, meliputi: keadilan antar kelompok masyarakat dan keadilan antar generasi.

a. Proses Pengkajian dan Analisis Pengaruh

Hasil telaahan pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) terhadap lingkungan hidup, di Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara khususnya di wilayah Senggigi Tiga Gili adalah untuk mengetahui estimasi dampak KRP terhadap isu yang telah diidentifikasi di wilayah tersebut. Berikut enam hal yang menjadi dasar telaah pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup dalam KLHS :

1. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.
2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup.

3. Kinerja layanan/jasa ekosistem
4. Tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya alam.
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim.
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

b. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan;

1. Ekosistem Pengaturan Iklim
Secara umum wilayah Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara memiliki potensi daya tampung lingkungan untuk pengaturan iklim cukup besar. Hampir semua wilayah memiliki potensi mulai dari kategori sedang sampai dengan sangat tinggi. Hanya sebagian kecil (< 0,11%) saja dari wilayah Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara yang memiliki potensi yang tergolong rendah sampai sangat rendah. Potensi yang besar tersebut tersebar hampir di semua wilayah.

Tabel 1.2. Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Berdasarkan Kabupaten

No	Kabupaten	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
		(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
1	Lombok Barat	2.211,30	0,11	566,40	0,03	14.417,12	0,74	27.278,44	1,40	44.641,54	2,29
2	Lombok Utara	252,62	0,01	638,38	0,03	9.144,59	0,47	21.802,56	1,12	49.789,05	2,55

Sumber : Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Provinsi NTB Tahun 2016

2. Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir
Secara alami, lebih dari 50% wilayah Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara memiliki potensi daya tampung jasa ekosistem tata air dan pengendalian banjir yang berkategori tinggi sampai dengan sangat tinggi. Kondisi dan luas potensi tersebut relatif bervariasi di masing-masing wilayah kabupaten.

Tabel 1.3. Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir Berdasarkan Kabupaten

No	Kabupaten	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
		(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
1	Lombok Barat	2.940,34	0,15	4.392,76	0,23	25.439,60	1,31	18.217,57	0,93	38.124,54	1,96
2	Lombok Utara	666,85	0,03	6.258,60	0,32	15.916,41	0,82	21.915,34	1,12	36.870,00	1,89

Sumber : Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Provinsi NTB Tahun 2016

3. Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Dari Bencana

Kabupaten di Provinsi NTB yang sebagian besar wilayahnya memiliki potensi daya tampung lingkungan untuk pencegahan dan perlindungan bencana yang tinggi sampai dengan sangat tinggi adalah Kabupaten Lombok Utara (KLU) dengan luas wilayah 81.627,20 Ha memiliki total potensi tergolong tinggi sampai dengan sangat tinggi seluas 69.302,57 Ha. Kondisi hutan dengan tutupan dan kerapatan yang tinggi akan menjaga keseimbangan daur hidrologi, sehingga dapat meminimalisir terjadinya bencana longsor, banjir bah, dan kekeringan.

Tabel 3.11. Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Berdasarkan Kabupaten

No	Kabupaten	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
		(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
1	Lombok Barat	2.893,81	0,15	11.019,24	0,57	23.314,14	1,20	22.800,85	1,17	29.086,76	1,49
2	Lombok Utara	640,61	0,03	5.278,56	0,27	6.405,46	0,33	25.745,72	1,32	43.556,85	2,24

Sumber : Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Provinsi NTB Tahun 2016

- Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air
Provinsi NTB merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak pulau kecil dengan luas total luas daratan 3.897.542,22 Ha yang sebagian besar wilayahnya merupakan lereng pegunungan. Dari luasan tersebut hanya 710.312,70 Ha (< 30%) wilayahnya yang memiliki potensi lingkungan jasa pemurnian air yang tergolong tinggi sampai dengan sangat tinggi. Dengan demikian Provinsi NTB termasuk salah satu provinsi yang sangat rentan mengalami krisis air bersih. Kondisi tersebut akan semakin parah jika alih fungsi lahan hutan menjadi daerah pemukiman atau infrastruktur lainnya dilakukan tanpa terkendali.

Salah satu kabupaten/kota di wilayah Provinsi NTB yang paling rawan mengalami krisis air bersih adalah Kabupaten Lombok Barat tidak memiliki lingkungan yang berpotensi tinggi sampai dengan sangat tinggi untuk jasa pemurnian air. Memiliki potensi yang sangat rendah untuk pemurnian air. Rendahnya potensi tersebut karena rendahnya tutupan vegetasi sebagai agen filtrasi pertama dalam proses pemurnian air. Lain halnya dengan Kabupaten Lombok Utara, wilayahnya memiliki potensi lingkungan yang rendah sampai dengan sedang dalam pemurnian air. Wilayah Kabupaten Lombok Utara yang memiliki potensi rendah sebagian besar berada di wilayah Lombok Utara dekat laut, dengan bentang lahan berupa perbukitan solusional.

Topografi yang miring atau terjal dan tutupan vegetasi yang relatif rendah menyebabkan laju kehilangan air sangat tinggi, baik akibat evapotranspirasi maupun aliran permukaan yang menuju kelaut. Kondisi tersebut menyebabkan kawasan tersebut mengalami tingkat kekeringan yang sangat tinggi pada saat musim kering sampai tanah permukaan merekah dengan rekahan >5 cm. Sedangkan pada musim hujan terjadibanjir pada bagian lembah antar bukit.

Tabel 1.4. Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air Berdasarkan Kabupaten

No	Kabupaten	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
		(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
1	Lombok Barat	2.123,49	0,11	16.156,42	0,83	49.354,25	2,53	19.802,13	1,02	1.678,51	0,09
2	Lombok Utara	1.630,62	0,08	14.184,63	0,73	17.573,37	0,90	37.940,70	1,95	10.297,88	0,53

Sumber : Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Provinsi NTB Tahun 2016

- Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah

Wilayah Provinsi NTB memiliki potensi lingkungan untuk jasa pengolahan dan penguraian limbah sangat kecil untuk kategori tinggi sampai dengan sangat tinggi. Rendahnya potensi tersebut tersebar di semua wilayah kabupaten dan kota di NTB. Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu kabupaten yang proporsi wilayahnya memiliki potensi rendah sampai dengan sangat rendah yang paling besar (Tabel 3.) Rendahnya potensi tersebut disebabkan karena tutupan lahan di Kabupaten Lombok Barat yang sebagian besar berupa bangunan pemukiman. Kondisi tersebut menyebabkan keanekaragaman hayati organisme dekomposer, baik tumbuhan maupun hewan menjadi sangat rendah. Dengan demikian sampah atau limbah yang ada di Kabupaten Lombok Barat akan sulit mengalami penguraian dibandingkan dengan Kabupaten Lombok Utara.

Tabel 1.5. Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Penguraian Limbah Berdasarkan Kabupaten

No	Kabupaten	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
		(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
1	Lombok Barat	1.663,05	0,09	40.622,79	2,08	32.309,35	1,66	13.387,23	0,69	1.132,39	0,06
2	Lombok Utara	1.462,55	0,08	22.533,65	1,16	37.524,05	1,93	10.692,97	0,55	9.413,98	0,48

Sumber : Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Provinsi NTB Tahun 2016

6. **Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara**
Sebagian besar wilayah kabupaten/kota di Provinsi NTB memiliki potensi lingkungan untuk pemeliharaan kualitas udara yang tergolong tinggi sampai sangat tinggi, seperti lingkungan Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara. Kedua Kabupaten tersebut memiliki potensi sangat tinggi sebagian besar merupakan bentang alam pegunungan dengan kondisi hutan yang relatif masih alami, terutama di daerah lereng Gunung Rinjani dengan tutupan berupa padang rumput atau ilalang.

Tabel 1.6. Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air Berdasarkan Kabupaten

Kabupaten	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
1. Lombok Barat	2.137,40	0,11	10.802,67	0,55	16.548,46	0,85	13.382,37	0,69	46.243,91	2,37
2. Lombok Utara	266,161	0,01	7.498,178	0,38	17.318,54	0,89	3.093,976	0,16	53.450,34	2,74

Sumber : Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Provinsi NTB Tahun 2016

7. **Perkiraan Mengenai Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup;**
Setelah menghitung daya dukung, daya tampung, dan status lingkungan wilayah Senggigi Tiga Gili diatas, langkah selanjutnya adalah analisa perkiraan mengenai dampak dan resiko dari kegiatan, rencana dan/atau program di wilayah Senggigi Tiga Gili. Berdasarkan topografi dan kondisi geografis wilayah Senggigi Tiga Gili, dimana memiliki resiko kebencanaan seperti erupsi gunung merapi, gempa bumi, kekeringan, tanah longsor, erosi, abrasi pantai, angin kencang, banjir dan lainnya. Adapun analisis dampak KRP terhadap kondisi lingkungan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.7. Analisis Dampak KRP Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup dan Kerawanan Bencana Di Wilayah Senggigi Tiga Gili

No	Kebijakan Rencana Program (KRP)	Dampak Lingkungan dan Kerawanan Bencana	
		Positif	Negatif
	Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Senggigi, Pelabuhan Penyeberangan Bangsal, Pelabuhan Penyeberangan Teluk Nare	Kelancaran lalu transportasi laut dan peningkatan ekonomi nelayan	Konversi lahan, penyusutan daya dukung air. Melintas kawasan rawan bencana tanah longsor, erosi, abrasi pantai, angin kencang, banjir.
	Pengembangan pelabuhan pengumpulan Senggigi dan Pelabuhan	Kelancaran lalu transportasi laut dan peningkatan	Konversi lahan, penyusutan daya dukung air. Melintas

Pengumpulan Bangsal	ekonomi nelayan	kawasan rawan bencana tanah longsor, erosi, abrasi pantai, angin kencang, banjir.
Pengembangan potensi energi alternatif terbarukan	Terpenuhinya kebutuhan energi	Konversi lahan, penyusutan daya dukung air. Melintas kawasan rawan bencana tanah longsor, erosi, abrasi pantai, angin kencang, banjir.
Pengembangan prasarana sistem pengendalian daya rusak air, konservasi sumber daya rusak air dan konservasi sumber daya air	- Sumber air bersih penduduk - Konservasi Air dan Sumber Irigasi	- Rawan kekeringan - Konflik Sosial - Rawan tanah longsor
Pengembangan kawasan pertanian tadah hujan	Penguatan daya dukung lahan pertanian	-
Pengembangan kawasan perkebunan	Peningkatan produksi perkebunan	-
Peningkatan produksi perikanan darat dalam zona PL berupa tambak air tawar dan payau	Peningkatan ekonomi nelayan	Intrusi air laut, abrasi pantai, dan rawan tsunami
Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Peningkatan kesejahteraan masyarakat	Konversi lahan pertanian, penyusutan daya dukung air, pencemaran air.
Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Peningkatan kesejahteraan masyarakat	Konversi lahan pertanian, penyusutan daya dukung air, pencemaran air.
Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Peningkatan kesejahteraan masyarakat	-
Optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Peningkatan ekonomi nelayan	-

Sumber: Hasil Kajian dan Analisis

PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian pengawasan mutu pelaksanaan kegiatan KLHS, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sebanyak 8 sub-kegiatan (31% dari total kegiatan) telah tercakup sepenuhnya, terutama pada kegiatan yang sifatnya pengindetifikasian dan inventarisir.
2. Sebanyak 14 sub-kegiatan (54% dari total kegiatan) telah tercakup sebagian besar, terutama pada kajian-kajian mengenai isu-isu pembangunan. Meskipun demikian, diperlukan penyempurnaan dengan memperkaya referensi kajian dan analisis mengenai efek-efek KRP terhadap lingkungan.
3. Hanya 2 sub-kegiatan (8% dari total kegiatan) yang tercakup sebagian kecil, yaitu pada sub-kegiatan mengonsultasikan dan menyepakati substansi rekomendasi bersama SKPD dan mengintegrasikan kesepakatan substansi rekomendasi ke RTR KSP bersama Tim Penyusun RTR KSP. Nilai ini diberikan

mengingat proses penyusunan RTR KSP telah rampung dan telah diperdakan.

4. Hanya 2 sub-kegiatan (8% dari total kegiatan) yang tidak tercakup sama sekali, yaitu pada sub-kegiatan yang berkaitan dengan penyampaian rancangan RTR KSP kepada Gubernur dan Bupati serta dokumentasinya. Hal ini disebabkan karena proses ini telah berakhir dan pada saat itu proses KLHS belum dilaksanakan.

Berdasarkan hasil kajian pengawasan mutu pelaksanaan kegiatan KLHS, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sebanyak 1 sub-kegiatan (10% dari total peran serta) telah tercakup sepenuhnya, yaitu pelibatan pemerintah. Disini pemerintah terlibat secara aktif.
2. Sebanyak 6 sub-kegiatan (60% dari total kegiatan) telah tercakup sebagian besar.
3. Sebanyak 3 sub-kegiatan (30% dari total kegiatan) yang tercakup sebagian kecil.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Teknis RTR KSP Senggigi Tiga Gili, Tahun 2011-2031

Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Provinsi NTB Tahun 2016

Partidário, 2007, Pendekatan Strategis dalam Kebijakan, Rencana dan Program (KRP)

Permen LH No 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan KLHS

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup